

**PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
UNTUK PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN  
SURABAYA TIMUR**

**ARTIKEL ILMIAH**



Oleh:

**PITALOKA SETIANTI**  
**NIM: 2014411016**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2017**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Pitaloka Setianti  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Desember 1996  
NIM : 2014411016  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Diploma 3  
Judul : Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor  
Untuk Pencapaian Penerimaan Pajak Pada Unit  
Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur

**Disetujui dan diterima baik oleh:**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal: ..11..9..17..



**(Kautsar Riza Salman, SE., AK, MSA., CA., BKP., SAS)**

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3,  
Tanggal: ..14-9-17..



**(Putri Wulanditya, SE., M.Ak., CPSAK)**

**THE IMPLEMENTATION OF MOTOR VEHICLE TAX COLLECTION  
FOR ACHIEVEMENT OF TAX REVENUE ON UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS PENDAPATAN  
SURABAYA TIMUR**

**Pitaloka Setianti**

STIE Perbanas Surabaya

[2014411016@students.perbanas.ac.id](mailto:2014411016@students.perbanas.ac.id)

**Kautsar Riza Salman**

STIE Perbanas Surabaya

[kautsar@perbanas.ac.id](mailto:kautsar@perbanas.ac.id)

Jalan Wonorejo Timur No. 16 Surabaya

**ABSTRACT**

*Along with the large number of motor vehicles, motor vehicle tax arrears from year to year also increased. Increasing the number of tax payers in arrears paying motor vehicle tax becomes one of the most frequent problems. To minimize motor vehicle tax arrears then the implementation of motor vehicle tax collection. The purpose of this research is to explain about the implementation of motor vehicle tax collection and know the achievement of tax revenue in the Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur. The method used in this research is descriptive qualitative. The result of this research is indicates that the implementation of motor vehicle tax collection has been in accordance with the Regional Regulations and the amount tax revenue has reached the target.*

**Keyword:** *Motor Vehicle Tax Collection, Vehicle Tax, Tax Revenue, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur*

**PENDAHULUAN**

Jumlah kendaraan bermotor setiap harinya terus mengalami peningkatan. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, tunggakan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun juga meningkat. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mencatat tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur hingga bulan Agustus 2016 mencapai lebih dari Rp 300 miliar dari total jumlah kendaraan wajib pajak di Jawa Timur. Meningkatnya jumlah wajib pajak yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi.

Pajak Kendaraan Bermotor memang banyak memberikan manfaat dalam Pendapatan Asli Daerah. Pajak ini dikelola oleh Dinas Pendapatan. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur merupakan suatu instansi pemerintah yang berkedudukan di ibukota Surabaya dan memiliki cabang dinas yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Unit Pelaksana Teknis atau biasa disingkat UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur adalah salah satu cabang dari Dinas Pendapatan.

Saat ini banyak wajib pajak yang lupa terhadap kewajibannya untuk membayar pajak setiap tahun. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan pajak

kendaraan bermotor menjadi menurun. Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang menurun dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi dari UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur dalam memberikan informasi mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tunggakan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak adalah dengan cara pihak UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur melakukan kegiatan sosialisasi. Bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan adalah dengan memberikan brosur kepada wajib pajak, memasang baliho, memberikan informasi melalui radio atau surat kabar serta melakukan operasi gabungan.

Penagihan pajak kendaraan bermotor memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor dilakukan karena adanya tunggakan pajak. Jika banyak wajib pajak yang menunggak maka mengakibatkan penerimaan pajak kendaraan menjadi turun. Oleh karena itu, kepatuhan dari wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Semua itu tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 7 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar dan pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Maka berdasarkan hal tersebut wajib pajak harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Pencapaian Penerimaan Pajak Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak tidak mematuhi

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atas kewajibannya untuk membayar pajak setiap tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor dan mengetahui pencapaian penerimaan pajak pada UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kegiatan penagihan yang dilaksanakan serta pelayanan yang diberikan untuk masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 9 tentang Pajak Daerah pengertian Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut: Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 10 tentang Pajak Daerah adalah:

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dari suatu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan yang digunakan di jalan darat dan air serta digerakkan dengan menggunakan roda dan motor.

### Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 5 Ayat 1 tentang Pajak Daerah menyebutkan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor meliputi orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 4 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan: Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Untuk wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

### Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 4 tentang Pajak Daerah mendefinisikan bahwa Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Jadi objek pajak kendaraan bermotor adalah penguasaan atau kepemilikan atas kendaraan bermotor yang digunakan oleh orang pribadi atau badan. Kendaraan bermotor luar daerah yang digunakan lebih dari 3 bulan di daerah wajib melaporkan kepada Kepala Dinas, jika tidak dilaporkan maka dilakukan pendataan.

Hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 4 tentang Pajak Daerah antara lain:

1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh

fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah

4. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

### Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 6 Ayat 1 tentang Pajak Daerah dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot
---------------------------------------

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung dari perkalian antara dua unsur pokok yaitu:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif pajak kendaraan bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013 dan 2014 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 dan 2015 menyebutkan tarif pajak kendaraan bermotor dibagi sesuai dengan jenis kepemilikan kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Tarif 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
2. Tarif 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum
3. Tarif 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah
4. Tarif 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Sedangkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi roda empat serta kendaraan bermotor roda dua yang isi silinder 250 cc ke atas dan didasarkan atas nama atau alamat yang sama dikenakan tarif progresif. Tarif progresif dikenakan kepada seseorang yang mempunyai kendaraan lebih dari satu unit. Besarnya tarif progresif berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 8 tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan kedua 2%
2. Kepemilikan ketiga 2,5%
3. Kepemilikan keempat 3%
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 9 tentang Pajak Daerah tarif pajak kendaraan bermotor dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor}$$

### Perhitungan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Taufik Fajrin Irfandy (2013) yang berjudul Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor menjelaskan contoh perhitungan tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak Kendaraan Bermotor} = \text{Tarif pajak} \times \text{Harga Kendaraan Baru}$$

Sebagai contoh untuk mobil Honda Civic tahun pembuatan 2012 dengan harga Rp 400.000.000 maka besarnya pajak kendaraan bermotor adalah

$$\text{Pajak Kendaraan Bermotor} = 1,5\% \times \text{Rp } 400.000.000$$

Sedangkan contoh perhitungan untuk kendaraan yang terkena pajak progresif adalah sebagai berikut

$$\text{Pajak Progresif} = \text{Tarif pajak} \times \text{NJKB}$$

Contoh untuk mobil Honda Jazz tahun pembuatan 2003 dengan nilai jual kendaraan bermotornya Rp 150.000.000 karena kepemilikan ketiga maka perhitungannya adalah

$$\text{Pajak Progresif} = 2,5\% \times \text{Rp } 150.000.000$$

### Tunggakan Pajak

Menurut Waluyo (2013:52) mengatakan bahwa tunggakan pajak adalah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.

Menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:1) adalah sebagai berikut:

Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Keterangan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

### Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa pengertian penagihan pajak sebagai berikut:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan



penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penanggung pajak yang dimaksud menurut Oyok Abunyamin (2016:545) menyatakan bahwa penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Tahapan Penagihan Pajak**

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 Pasal 18 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, tahapan penagihan pajak kendaraan adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak PKB yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran pada saat jatuh tempo diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah pada hari berikutnya
2. Setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah diterbitkan, apabila dalam jangka waktu 30 hari pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah
3. Setelah 14 hari diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Pertama (SP 1)
4. Setelah 21 hari diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SP 2)

### **Dokumen yang Terkait dengan Penagihan**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 58 tentang Pajak Daerah dokumen yang digunakan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
2. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

3. Surat Peringatan Pertama (SP 1)
4. Surat Peringatan Kedua (SP 2)
5. Surat Paksa

### **Penerimaan Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 mendefinisikan penerimaan pajak adalah penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja maupun pembangunan negara. Sedangkan menurut John Hutagaol (2007:325) mengatakan bahwa penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin atau pembangunan negara.

### **Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 10 tentang Pajak Daerah menjelaskan pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor terutang sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah. Pajak kendaraan bermotor dilunasi paling lambat 30 hari sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah diterbitkan. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan ke kas daerah bank ataupun tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

Wajib pajak yang telah membayar pajak diberikan tanda bukti pembayaran atau pelunasan pajak. Wajib pajak yang terlambat membayar pajak akan dikenakan sanksi yaitu:

1. Keterlambatan pembayaran yang melebihi jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi yang berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak

2. Keterlambatan pembayaran yang melebihi 15 hari dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari pajak yang terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 2 tahun atau 24 bulan terhitung sejak terutangnya pajak

### **Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah menyatakan sebagai berikut: Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan pajak oleh Unit Pelaksana Teknis dilaporkan kepada Dinas secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan bentuk pelaporan yang ditentukan oleh Dinas dan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya Kepala Dinas melaporkannya kepada Gubernur.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa pelaporan pajak kendaraan bermotor adalah kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis mulai dari proses pemungutan hingga hasil pelaksanaan pemungutan dan dilaporkan ke Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Gubernur.

### **GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN**

Pada 1962 ini merupakan langkah awal kegiatan Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: Des/451/G/28/Drh tanggal 28 Maret 1962, namun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor Des/1205/G/110/Drh tanggal 26 September 1962 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur baru dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1962, tanggal pemberlakuan inilah yang diperingati sebagai hari jadi bagi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur.

Sejak 11 Juni 1977 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah

Tingkat I Jawa Timur berkedudukan di Jalan Manyar Kertoarjo No. 1 Surabaya yang saat ini menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan 38 Unit Pelaksana Teknis Dinas di seluruh Jawa Timur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000 yang menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Jawa Timur saat ini berjumlah 35. UPT Dinas Pendapatan merupakan unit kerja yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan. UPT Dinas Pendapatan dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur merupakan suatu instansi pemerintah yang berkedudukan di ibukota Surabaya dan cabang dinas tersebar di seluruh Jawa Timur. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan wilayah Surabaya Timur adalah salah satu cabang dari Dinas Pendapatan. UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur berlokasi di Jl. Menur No. 31 B Surabaya. Wilayah kerja operasional Surabaya Timur meliputi 6 kecamatan yaitu Tambaksari, Mulyosari, Gubeng, Sukolilo, Rungkut dan Gunung Anyar.

UPT Dinas Pendapatan merupakan instansi yang melaksanakan tugas-tugas dinas di bidang teknis operasional di lapangan seperti pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Visi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur adalah terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dibanggakan dalam pelayanan publik. Dalam mencapai sebuah visi, maka diperlukan misi. Adapun misi dari UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur adalah sebagai berikut:



1. Bidang Pendapatan Daerah  
Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan
2. Bidang Pelayanan Publik  
Mewujudkan pelayanan publik yang baik (excellent service), terpercaya dan transparan
3. Bidang Kelembagaan  
Mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang potensial, integritas tinggi dan profesional serta membangun kelembagaan yang berbasis kompetensi  
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, UPT Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah
  2. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) di Kantor Bersama Samsat
  3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat
  4. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah
  5. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan
  6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
  7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

## **PEMBAHASAN**

### **Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor**

Penagihan pajak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Surabaya Timur dilaksanakan oleh seksi penagihan karena adanya tunggakan pajak atas kendaraan bermotor yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Jika wajib pajak tidak melunasi pajak yang terutang setelah jatuh tempo pembayaran, maka seksi penagihan akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan dengan

memberikan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor atau SPKPKB sebagai awal tindakan penagihan pajak terlebih dahulu. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada wajib pajak terkait tentang kewajibannya yang harus dilaksanakan sebelum masa pajak berakhir dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur.

UPT Dinas Pendapatan bertindak untuk mengeluarkan surat pemberitahuan atau surat perpajakan. Surat pemberitahuan diterbitkan 14 hari sebelum akhir masa pajak kendaraan bermotor. Dalam jangka waktu 14 hari surat pemberitahuan diterima, wajib pajak wajib melunasi pajak yang terutang agar penunggakan pajak kendaraan bermotor tidak semakin meningkat disetiap tahunnya. Jika wajib pajak tidak melunasi pajak yang terutang maka akan berlanjut ke surat perpajakan yang lainnya. Tunggakan pajak merupakan hutang pajak yang timbul karena adanya surat pajak. Jadi seseorang atau badan baru mempunyai hutang pajak bila sudah diberikan surat pajak oleh petugas pajak dari pihak UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur. Seksi penagihan tidak berhak memaksa wajib pajak untuk membayar pajak, namun seksi penagihan wajib memberitahukan atas status pajak dan sanksi pajak yang telah ditetapkan serta mensosialisasikan tentang peraturan pajak daerah khususnya tentang pajak kendaraan bermotor.

### **Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah**

Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang. Jangka waktu untuk melunasi pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah selama 30 hari. Surat Ketetapan Pajak Daerah ini dicetak pada satu hari setelah jatuh tempo pembayaran oleh seksi pendataan dan penetapan. Penerbitan Surat

Ketetapan Pajak Daerah menggunakan blanko SKPD rangkap 2 yang terdiri dari:

1. Lembar pertama untuk wajib pajak
2. Lembar kedua untuk seksi pembayaran dan penagihan

Kemudian tahapan yang dilaksanakan oleh seksi penagihan setelah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah dari seksi pendataan dan penetapan
2. Memilah Surat Ketetapan Pajak Daerah per kecamatan. Kemudian dibagikan ke koordinator lapangannya masing-masing di setiap kecamatan. Dalam wilayah kerja UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur terdiri dari 6 kecamatan yaitu:
  - 1) Tambaksari
  - 2) Mulyosari
  - 3) Gubeng
  - 4) Sukolilo
  - 5) Rungkut
  - 6) Gunung Anyar
3. Koordinator lapangan dari masing-masing kecamatan membagikan Surat Ketetapan Pajak Daerah ke anggotanya untuk menyampaikan SKPD ke wajib pajak secara door to door sesuai dengan alamat wajib pajak
4. Menerima kembali hasil penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan status kendaraan bermotor dan telah ditandatangani oleh wajib pajak
5. Berdasarkan dari data hasil penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah ke wajib pajak dimasukkan ke aplikasi SAAP (Sistem Aplikasi Administrasi Perpajakan) untuk dilakukan pemberian status kendaraan bermotor
6. Menyimpan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang belum lunas sebagai arsip

#### **Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah**

Surat Tagihan Pajak Daerah atau STPD adalah surat untuk melakukan

tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga. Surat Tagihan Pajak Daerah diterbitkan jika jangka waktu Surat Ketetapan Pajak Daerah telah habis dan wajib pajak masih belum melunasi pajak yang terutang. STPD diterbitkan 30 hari setelah SKPD, pajak yang terutang ditagih dengan menggunakan STPD ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Surat Tagihan Pajak Daerah diterbitkan oleh seksi penagihan dan pembayaran dengan status kendaraan yang dimiliki saja. Jika kendaraan bermotor berstatus lapor jual, alamat tidak jelas, kecelakaan laka, rusak atau hilang maka tidak akan diterbitkan. Jangka waktu untuk melunasi jumlah pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah ini adalah selama 2 minggu atau 14 hari. Surat Tagihan Pajak Daerah yang diterbitkan terdiri dari 2 rangkap yaitu:

1. Lembar pertama untuk wajib pajak
2. Lembar kedua untuk seksi pembayaran dan penagihan Laporan Posisi Keuangan

Tahapan yang dilaksanakan oleh seksi penagihan setelah penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Memilah Surat Tagihan Pajak Daerah per kecamatan. Kemudian dibagikan ke koordinator lapangannya masing-masing di setiap kecamatan
2. Koordinator lapangan dari masing-masing kecamatan membagikan Surat Tagihan Pajak Daerah ke anggotanya untuk menyampaikan STPD kepada wajib pajak secara door to door sesuai dengan data pajak kendaraan bermotor. Jika wajib pajak tidak ada di tempat maka tindakan penagihan pajak akan diulangi pada hari berikutnya.
3. Menerima hasil penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah sesuai dengan status kendaraan bermotor dan telah ditandatangani oleh wajib pajak
4. Berdasarkan dari data hasil penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah ke wajib pajak dimasukkan ke

aplikasi SAAP (Sistem Aplikasi Administrasi Perpajakan) untuk dilakukan pemberian status kendaraan bermotor

5. Menyimpan Surat Tagihan Pajak Daerah yang belum lunas sebagai arsip

### **Penerbitan Surat Peringatan Pertama**

Surat Peringatan Pertama atau SP 1 adalah surat yang digunakan sebagai pemberitahuan pertama kepada wajib pajak setelah diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah. Setelah 14 hari Surat Tagihan Pajak Daerah diterbitkan, maka diterbitkan Surat Peringatan Pertama. Jangka waktu untuk melunasi jumlah pajak yang terutang dalam Surat Peringatan Pertama adalah selama 21 hari. Penyampaian Surat Peringatan Pertama tidak harus dilakukan oleh jurusita, namun dapat dilakukan melalui:

1. Dilakukan oleh petugas seksi penagihan secara langsung atau melalui door to door kepada wajib pajak yang bersangkutan
2. Melalui jasa kurir dengan bukti pengiriman surat

Penerbitan Surat Peringatan Pertama 14 hari setelah pajak yang terutang dalam STPD tidak dibayar dengan status kendaraan dimiliki terdiri dari 2 rangkap yaitu:

1. Lembar pertama untuk wajib pajak
2. Lembar kedua untuk seksi penagihan dan pembayaran

Tahapan yang dilaksanakan setelah Surat Peringatan Pertama diterbitkan oleh seksi penagihan dan pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Seksi penagihan memilah Surat Peringatan Pertama berdasarkan kecamatan dan membagikan ke anggotanya masing-masing di setiap kecamatan
2. Menyampaikan Surat Peringatan Pertama kepada wajib pajak sesuai dengan alamat wajib pajak
3. Menerima kembali hasil penyampaian Surat Peringatan Pertama disertai dengan tanda tangan wajib pajak

sebagai bukti telah menerima Surat Peringatan Pertama dan memberikan catatan seperlunya pada lembar kedua SP 1 terkait dengan kebenaran objek dan subjek pajak kendaraan bermotor

4. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, data dari hasil penyampaian Surat Peringatan Pertama dimasukkan ke aplikasi SAAP (Sistem Aplikasi Administrasi Perpajakan)
5. Menyimpan Surat Peringatan Pertama yang belum lunas sebagai arsip

### **Penerbitan Surat Peringatan Kedua**

Surat Peringatan Kedua atau SP 2 adalah surat yang digunakan sebagai pemberitahuan kedua kepada wajib pajak setelah diterbitkannya Surat Peringatan Pertama. Setelah 21 hari Surat Peringatan Pertama tidak dilunasi, maka diterbitkan Surat Peringatan Kedua. Dari Surat Peringatan Kedua jika wajib pajak masih belum juga melunasi pajaknya yang terutang sampai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan dan sudah ditagih berkali-kali dengan surat-surat pajak yang berkaitan maka wajib pajak akan ditagih dengan Surat Paksa. Penerbitan Surat Peringatan ini dimaksudkan bahwa wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi sampai dengan jangka waktu 21 hari serta sebagai peringatan terakhir kepada wajib pajak untuk segera melunasi pajak yang terutang sebelum dilakukannya tindakan penagihan dengan diterbitkan surat paksa dalam hal yang terkait dengan wajib pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Tidak berbeda dengan surat perpajakan yang lainnya, Surat Peringatan Kedua ini diterbitkan 21 hari setelah Surat Peringatan Pertama diterbitkan dengan status kendaraan dimiliki yang terdiri dari 2 rangkap yaitu:

1. Lembar pertama untuk wajib pajak
2. Lembar kedua untuk seksi penagihan dan pembayaran

Tahapan yang dilaksanakan setelah Surat Peringatan Kedua diterbitkan oleh seksi penagihan dan pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Seksi penagihan memilah Surat Peringatan Kedua berdasarkan kecamatan dan membagikan ke anggotanya masing-masing di setiap kecamatan
2. Menyampaikan Surat Peringatan Kedua kepada wajib pajak sesuai dengan alamat wajib pajak
3. Menerima kembali hasil penyampaian Surat Peringatan Kedua disertai dengan tanda tangan sebagai bukti telah menerima Surat Peringatan Kedua dan memberikan catatan seperlunya pada lembar kedua SP 2 terkait dengan kebenaran objek dan subjek pajak kendaraan bermotor
4. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, data dari hasil penyampaian Surat Peringatan Kedua dimasukkan ke aplikasi SAAP (Sistem Aplikasi Administrasi Perpajakan)
5. Menyimpan Surat Peringatan Kedua yang belum lunas sebagai arsip

#### **Penerbitan Surat Paksa**

Surat paksa adalah surat perintah untuk membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa ini diterbitkan jika sampai jangka waktu Surat Peringatan Kedua telah habis dan wajib pajak masih belum melunasi pajak yang terutang. Surat paksa merupakan surat dan cara terakhir agar wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang terutang. Jika pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah tanggal pemberitahuan surat paksa kepada wajib pajak maka akan dilakukan penyitaan. Dalam hal ini harus petugas jurusita yang bertindak untuk mendatangi rumah wajib pajak untuk melakukan penyitaan atas barang yang seharga dengan hutang pajaknya. Ketika melakukan penyitaan, petugas jurusita didampingi oleh polisi dan petugas dari pengadilan.

Penerbitan Surat Paksa akan diakui jika Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Peringatan Pertama (SP 1) dan Surat Peringatan Kedua (SP 2) yang diterbitkan sudah diberikan kepada wajib pajak yang terutang. Wajib pajak yang terutang harus membayar kewajibannya sebesar nominal yang tercantum pada surat yang diberikan oleh seksi penagihan UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur. Penerbitan Surat Paksa harus memuat informasi sebagai berikut:

1. Nama wajib pajak/penanggung jawab  
Nama wajib pajak yang terutang harus tercantum di surat paksa. Jika nama wajib pajak tidak ada maka bisa menggunakan nama penanggung pajak
2. Alamat/tempat tinggal  
Alamat yang tercantum di surat paksa merupakan alamat tempat tinggal wajib pajak yang terutang
3. Jumlah tunggakan pajak  
Besarnya hutang pajak yang tercantum pada surat paksa dan harus dibayar oleh wajib pajak
4. Perintah untuk membayar  
Wajib pajak diwajibkan untuk membayar kewajiban pajak yang masih terutang sebesar jumlah pajak yang tercantum pada Surat Paksa

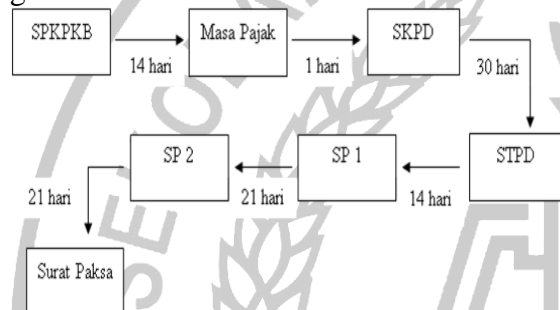
#### **Proses Penagihan PKB**

Rangkaian proses penagihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur dimulai dari penerbitan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (SPKPKB) pada 14 hari sebelum masa pajak kendaraan bermotor berakhir.

Setelah 1 hari masa pajak kendaraan bermotor berakhir dan wajib pajak belum membayar pajak yang terutang maka pihak UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) belum dilunasi oleh wajib pajak selama 30 hari dari tanggal

penerbitan maka pegawai seksi penagihan akan memberikan surat berikutnya yaitu Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Jatuh tempo pelunasan setelah diterbitkan adalah 14 hari. Apabila wajib pajak masih belum melunasi maka diterbitkan Surat Peringatan Pertama (SP 1).

Setelah 21 hari diterbitkan Surat Peringatan Pertama (SP 1) dan wajib pajak belum juga membayar maka akan diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SP 2). Setelah 21 hari penerbitan Surat Peringatan Kedua (SP 2) maka langkah terakhir adalah diterbitkannya Surat Paksa. Proses penagihan PKB dapat dilihat dari gambar berikut:



Sumber: diolah

**Gambar 1**  
**PROSES PENAGIHAN PKB**

### Faktor Penunggakan PKB

Berdasarkan dari hasil wawancara dalam pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor pada UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur, menurut pegawai seksi penagihan mayoritas wajib pajak menunggak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya tepat waktu karena hal-hal berikut:

1. Tidak memiliki waktu atau sibuk
2. Tidak memiliki uang
3. Merasa apatis untuk membayar pajak
4. Kurangnya pemahaman untuk membayar pajak
5. Menganggap denda membayar pajak jika terlambat 1 hari sama dengan 1 tahun

### Upaya Meminimalisir Tunggakan

Tunggakan pajak kendaraan yang tinggi dapat mengakibatkan penerimaan

pajak kendaraan bermotor tidak tercapai. Dengan demikian UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur mengambil suatu tindakan untuk perkembangan dalam melakukan meminimalisir tunggakan pajak kendaraan bermotor. Upaya-upaya yang dilakukan oleh UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur adalah dengan melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak. Sosialisasi yang dilaksanakan berupa:

1. Memberikan sosialisasi melalui media elektronik dan media sosial
2. Memberikan brosur
3. Layanan e-samsat
4. Operasi gabungan

### Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor yang digunakan oleh orang pribadi atau badan. Saat ini Surabaya menjadi kota metropolitan yang kedua di Indonesia setelah Jakarta yang memiliki penduduk dengan tingkat aktivitas yang cukup tinggi, setiap harinya pasti sangat membutuhkan sarana transportasi yang memadai. Namun hal tersebut tidak sebanding dengan fasilitas sarana transportasi yang ada di Surabaya yang kualitasnya dapat dikatakan kurang maksimal. Sehingga mengakibatkan rata-rata masyarakat kota Surabaya per kepala keluarga memiliki minimal satu kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya jumlah penduduk kota Surabaya setiap tahun tentunya akan semakin meningkat juga jumlah kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak di kota Surabaya. Berikut data jumlah kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak di wilayah Surabaya Timur:

**Tabel 1**  
**DATA OBJEK PAJAK KENDARAAN**  
**BERMOTOR**

Jenis Kendaraan	Tahun	
	2013	2014
Mobil Penumpang	105.298	111.824
Mobil Bus	781	844
Mobil Barang	27.485	28.861
Sepeda Motor	398.580	432.205
Alat Berat dan Besar	23	24
<b>Jumlah</b>	<b>532.167</b>	<b>573.758</b>
Jenis Kendaraan	Tahun	
	2015	2016
Mobil Penumpang	118.251	125.244
Mobil Bus	915	935
Mobil Barang	29.467	29.921
Sepeda Motor	466.461	497.384
Alat Berat dan Besar	26	25
<b>Jumlah</b>	<b>615.120</b>	<b>653.509</b>

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur

Berdasarkan dari tabel 1 Data Objek Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat bahwa wilayah Surabaya Timur yang terdiri dari 6 kecamatan yaitu Tambaksari, Mulyosari, Gubeng, Sukolilo, Rungkut dan Gunung Anyar dari tahun 2013 sampai tahun 2016 memiliki jumlah objek pajak kendaraan bermotor yang terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan objek pajak kendaraan bermotor tertinggi terjadi pada tahun 2016, dimana objek pajak di wilayah Surabaya Timur pada tahun 2016 mencapai 653.509 kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tersebut terdiri dari lima jenis kendaraan yaitu 125.244 mobil penumpang, 935 mobil bus, 29.921 mobil barang, 497.384 sepeda motor, serta 25 alat berat dan besar.

Dari jumlah objek pajak tersebut menjadi acuan dasar Dinas Pendapatan untuk menentukan besarnya target pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya.

#### **Target dan Realisasi Penerimaan PKB**

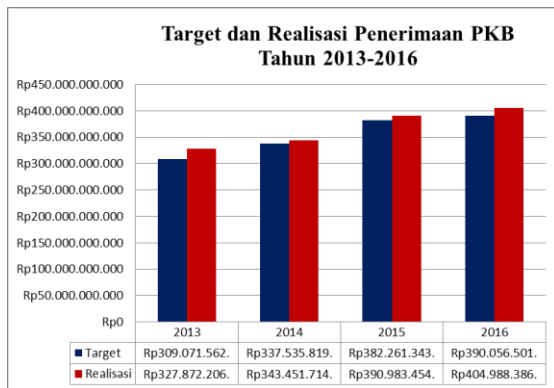
Penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Surabaya Timur merupakan penerimaan yang berasal dari pajak yang dipungut dari masing-masing kecamatan yang berada di Surabaya Timur berdasarkan undang-undang dan peraturan tentang perpajakan yang telah ditetapkan. Besarnya target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur pada tahun 2013-2016 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**TARGET DAN REALISASI**  
**PENERIMAAN PKB TAHUN**  
**2013-2016**

Tahun	Target	Realisasi	Selisih
2013	309.071. 562.000	327.872. 206.122	18.800. 644.122
2014	337.535. 819.000	343.451. 714.115	5.915. 895.115
2015	382.261. 343.000	390.983. 454.533	8.722. 111.533
2016	390.056. 501.000	404.988. 386.425	14.931. 885.425

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur

Dari tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan PKB Tahun 2013-2016 di atas dapat dilihat target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Surabaya Timur selalu mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:



Sumber: diolah

**Gambar 2**  
**TARGET DAN REALISASI**  
**PENERIMAAN PKB TAHUN**  
**2013-2016**

Dari tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan PKB Tahun 2013-2016 dan gambar 2 Target dan Realisasi Penerimaan PKB Tahun 2013-2016 dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 target pajak kendaraan bermotor senilai Rp 309.071.562.000 dan realisasi senilai Rp 327.872.206.122 dimana total realisasi mencapai total target karena total realisasi melampaui jumlah target yang diinginkan.

Pada tahun 2014 dapat dilihat bahwa target pajak kendaraan bermotor senilai Rp 337.535.819.000 dan realisasi senilai Rp 343.451.714.115 dimana total realisasi mencapai total target karena total target lebih kecil dari pada total realisasi sehingga terdapat selisih yang memang tidak begitu besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 5.915.895.115. Begitu juga pada tahun 2015, target pajak kendaraan bermotor senilai Rp 382.261.343.000 dan realisasi senilai Rp 390.983.454.533 dimana total realisasi mencapai total target karena total target lebih kecil dari pada total realisasi sehingga terdapat selisih yaitu sebesar Rp 8.722.111.533.

Penerimaan pajak pada tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target pajak kendaraan bermotor senilai Rp 390.056.501.000 dan realisasi senilai Rp 404.988.386.425

dimana total realisasi mencapai total target karena total target lebih kecil dari pada total realisasi sehingga terdapat selisih yaitu sebesar Rp 14.931.885.425.

### Persentase Penerimaan Pajak

Besarnya persentase target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur pada tahun 2013-2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**PERSENTASE PENERIMAAN PAJAK**  
**TAHUN 2013-2016**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2013	309.071.562.000	327.872.206.122	106,00
2014	337.535.819.000	343.451.714.115	101,75
2015	382.261.343.000	390.983.454.533	102,28
2016	390.056.501.000	404.988.386.425	103,83

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur

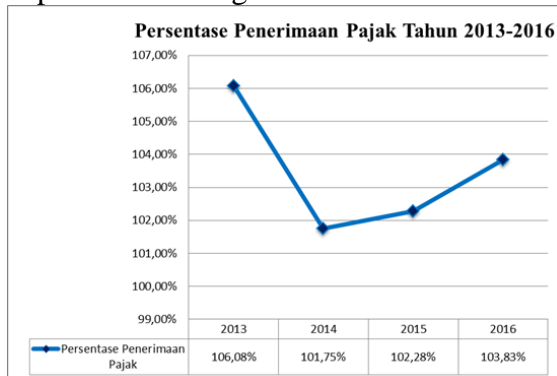
Untuk menghitung persentase penerimaan pajak kendaraan bermotor maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi pajak kendaraan bermotor}}{\text{Target pajak kendaraan bermotor}} \times 100\%$$

Tahun 2013	$\frac{327.872.206.122}{309.071.562.000} \times 100\%$	= 106,08%
Tahun 2014	$\frac{343.451.714.115}{337.535.819.000} \times 100\%$	= 101,75%
Tahun 2015	$\frac{390.983.454.533}{382.261.343.000} \times 100\%$	= 102,28%
Tahun 2016	$\frac{404.988.386.425}{390.056.501.000} \times 100\%$	= 103,83%



Dari tabel 3 Persentase Penerimaan Pajak Tahun 2013-2016 dapat dilihat persentase penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Surabaya Timur mengalami perubahan dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar 3 di bawah ini:



Sumber: diolah

**Gambar 3**  
**PERSENTASE PENERIMAAN PAJAK**  
**TAHUN 2013-2016**

Berdasarkan tabel 3 Persentase Penerimaan Pajak Tahun 2013-2016 dan gambar 3 Persentase Penerimaan Pajak Tahun 2013-2016 dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Surabaya Timur selama empat tahun terakhir terus mengalami perubahan. Dimana penerimaan pajak kendaraan bermotor di tahun 2013 adalah yang paling tinggi dengan persentase sebesar 106,08%. Kemudian pada tahun 2014 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 4,33% sehingga penerimaan pajak berada pada persentase 101,75%. Namun di tahun 2015 penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 0,53% sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat menjadi 102,28%. Untuk penerimaan pajak di tahun 2016 terus mengalami peningkatan mencapai 103,83% dengan tingkat pertumbuhan sampai 1,55%. Meskipun mengalami penurunan penerimaan pajak dari tahun 2013 ke 2014, penerimaan pajak kendaraan bermotor dikatakan tercapai karena persentasenya lebih dari 100%. Jika

dilihat dari besarnya pertumbuhan penerimaan pajak maka dapat dikatakan wilayah Surabaya Timur memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor jika realisasi penerimaan pajak mencapai target dan pihak UPT Dinas Pendapatan terus menaikkan target agar dapat mengetahui sejauh mana target yang mampu dicapai.

Persentase penerimaan pajak pada tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2013 hingga tahun 2014 persentase penerimaan pajak mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya pengurangan wilayah kerja di UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur yang semula terdiri dari tujuh kecamatan wilayah kerja, kemudian sejak akhir tahun 2013 menjadi hanya enam kecamatan. Kecamatan yang dipisahkan dari wilayah Surabaya Timur adalah kecamatan Tenggilis Mejoyo yang sekarang menjadi wilayah kerja Surabaya Selatan. Hal ini yang menjadi faktor yang menyebabkan persentase penerimaan pajak mengalami fluktuasi dan terjadinya peningkatan penetapan target pajak kendaraan bermotor di tahun 2014. Namun seiring dengan ditingkatkannya target pajak kendaraan bermotor di UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur pada tahun 2014 yang jumlah targetnya sebesar Rp 337.535.819.000 dapat terealisasi melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 343.451.714.115. Kemudian pada tahun 2015 dan tahun 2016 penerimaan pajak kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan sedikit demi sedikit, hal ini dikarenakan adanya dampak sosialisasi yang cukup efektif yaitu surat perpajakan yang disampaikan pada saat pelaksanaan penagihan telah diterima oleh wajib pajak serta adanya kegiatan operasi gabungan.

Jadi pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor yang telah dilakukan oleh UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur dari seluruh kecamatan dan objek pajak kendaraan bermotor yang ada di wilayah kerja Surabaya Timur pada tahun

2013 sampai dengan tahun 2016 telah mencapai penerimaan pajak meskipun bersifat fluktuatif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Surabaya Timur adalah unit kerja dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang memiliki wilayah kerja di Surabaya Timur dan bertugas melaksanakan teknis operasional di lapangan. Kegiatan penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur dilaksanakan oleh seksi penagihan. Penagihan pajak kendaraan bermotor memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak.

Pelaksanaan penagihan dilakukan karena adanya tunggakan pajak. Jika wajib pajak banyak yang menunggak maka mengakibatkan penerimaan pajak menjadi turun. Dari hasil penelitian, pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor untuk pencapaian penerimaan pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rangkaian penagihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur dimulai dari penerbitan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor pada 14 hari sebelum masa pajak berakhir. Setelah 1 hari masa pajak berakhir maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Setelah 30 hari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah langkah selanjutnya yaitu penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah. Apabila wajib pajak belum melunasi selama 14 hari maka diterbitkan Surat Peringatan Pertama, setelah 21 hari penerbitan Surat Peringatan Pertama maka akan diterbitkan Surat Peringatan Kedua. Kemudian selama 21 hari penerbitan Surat Peringatan Kedua maka langkah terakhir adalah diterbitkannya Surat Paksa.

2. Besarnya jumlah objek pajak kendaraan bermotor menjadi acuan dasar Dinas Pendapatan untuk menentukan besarnya target setiap tahun. Penerimaan pajak di wilayah Surabaya Timur pada tahun 2013 hingga 2016 telah mencapai total target yang telah ditentukan. Dimana total realisasi melampaui jumlah target yang diinginkan.
3. Pertumbuhan penerimaan pajak di wilayah Surabaya Timur selama tahun 2013 hingga 2016 terus mengalami perubahan. Dimana penerimaan pajak kendaraan bermotor di tahun 2013 adalah yang paling tinggi dengan persentase 106,08%. Kemudian di tahun 2014 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 4,33%. Namun di tahun 2015 dan 2016 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan. Hal itu dikarenakan adanya pengurangan wilayah kerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur yang semula terdiri dari 7 kecamatan, kemudian sejak akhir tahun 2013 menjadi hanya 6 kecamatan. Kecamatan yang dipisahkan dari wilayah Surabaya Timur adalah kecamatan Tenggilis Mejoyo.

### **Saran**

Berikut saran yang dapat dijadikan masukan untuk UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada saat penyampaian surat pajak dilakukan namun wajib pajak tidak ada di tempat maka surat pajak dapat diberikan melalui ketua RT dengan kepastian kebenaran alamat wajib pajak agar petugas seksi penagihan tidak perlu mendatangi lagi rumah wajib pajak sehingga penyampaian surat pajak menjadi lebih cepat.
2. Selama melakukan kegiatan operasi gabungan sebaiknya selalu

menyediakan mobil samsat keliling agar wajib pajak yang belum melunasi pajak kendaraan bermotor dapat segera membayar di tempat.

3. Hendaknya pihak UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur terus melakukan sosialisasi dengan cara melalui SMS Broadcast yang dikirimkan ke nomor telepon masing-masing wajib pajak yang ada di dalam database aplikasi SAAP ketika 14 hari sebelum akhir masa pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
4. Lebih rutin memberikan update informasi melalui website dan media sosial terkait waktu dan tempat pelayanan pembayaran pajak serta himbauan agar wajib pajak segera membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor di lapangan perlu diimplementasikan dengan baik agar surat perpajakan yang diterbitkan dapat tersampaikan ke wajib pajak.

#### DAFTAR RUJUKAN

Abuyamin Oyok.2016.*Perpajakan*.

Bandung: Mega Rancage Press

El Wahyu Candra Herdiant.Wawancara dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur. Surabaya 5 Mei 2017

<http://www.dipendajatim.go.id/page-profil?uptd=dinas> (diakses pada tanggal 5 April 2017)

Hutagaol, J., 2007. *Perpajakan: isu-isu kontemporer*.Yogyakarta: Graha Ilmu

Irfandy, TF., 2013. "Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk)".

Jurnal Administrasi Publik, 1(4), Pp.194-202

Keuangan, K., 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. KEMENKEU, Jakarta

Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas.Penagihan Pajak di Indonesia.2006.Malang: Bayumedia Publishing

Pemerintah, R.I., 2000. Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pemerintah RI, Jakarta

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013 dan 2014

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 dan 2015

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Waluyo.2013.Perpajakan Indonesia.Jakarta: Salemba Empat